

Efektivitas Dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Bangka Belitung

Nesda Varicela,
Nizwan Zukhri
Hamsani
Universitas Bangka Belitung
nizwan_ubb@yahoo.com

Abstract

The enactment of Law number 32 of 2004 has an impact on the regions, namely obtaining the right to seek and increase the potential sources of revenue in the region itself, reflected in the financial condition as a benchmark in assessing the independence of an area as measured by the high and low level of Local Government Revenue (PAD). One of the sources of Local Government Revenue (PAD) is tax and retribution revenue related to the mining and tourism sectors. This study aims to examine the comparison of the contribution of the mining sector and the tourism sector in improving the economy in the Province of Bangka Belitung Islands. This research is a quantitative descriptive study, which is sourced from reports of Local Government Revenue (PAD) of 6 Regencies and 1 City and Gross Domestic Regional Product (PDRB) of Bangka Belitung Islands Province for the period 2014-2018. The analytical tool used in this research is the ratio of effectiveness and contribution ratio. The results of this study indicate that the level of effectiveness of the mining sector and the tourism sector has a very effective level of effectiveness. Based on the results of the contribution of the mining sector and the tourism sector to Local Government Revenue (PAD) during the 2014-2018 period, the mining sector contributed IDR 75.6 billion, with an average contribution of 11.03% (less) per year. The tourism sector contributed an amount of IDR 44.5 billion, with an average contribution of 7% (very less) per year.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, PAD in the Mining Sector, PAD in the Tourism Sector*

Intisari

Ditetapkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 berdampak pada daerah, yaitu mendapatkan hak untuk mencari dan meningkatkan potensi sumber penerimaan yang ada di daerahnya sendiri, dicerminkan dari kondisi finansial sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah yang diukur berdasarkan tinggi rendahnya PAD. Salah satu sumber PAD adalah penerimaan pajak dan retribusi yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbandingan peran kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bersumber dari laporan PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota dan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2014-2018. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata sama-sama memiliki tingkat efektifitas yang sangat efektif. Berdasarkan hasil kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD rata-rata selama periode tahun 2014-2018 sektor

pertambangan berkontribusi sejumlah Rp 75,6 Miliar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,03% (kurang) pertahun. Sektor pariwisata berkontribusi sejumlah Rp 44,5 Miliar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 7% (sangat kurang) pertahun.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PAD Sektor Pertambangan, PAD Sektor Pariwisata

A. Pendahuluan

Ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 berdampak pada daerah yaitu mendapatkan hak untuk mencari dan meningkatkan potensi sumber penerimaan yang ada di daerahnya sendiri, serta diharapkan dapat membangkitkan semangat pemerintah daerah pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka membangun daerahnya agar lebih mandiri. Zukhri (2020) mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016-2018 berada pada level rendah, yang berarti berada pada pola hubungan konsultatif. Salah satu faktor penyebab rendahnya kemandirian adalah masih rendahnya penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2014 hingga 2018 berfluktuatif setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
2014	399.965.098.144	427.580.506.879	106,90
2015	565.350.614.641	599.620.953.180	106,06
2016	675.163.916.493	663.445.639.676	98,26
2017	899.566.349.616	879.784.561.698	97,80
2018	809.395.435.702	848.330.012.018	104,81

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui selama periode tahun 2014-2018 realisasi penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata mencapai target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2016 dan 2017. PAD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung terus meningkat tiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar 3,5 persen dari total PAD tahun sebelumnya. Salah satu alternatif untuk meningkatkan PAD adalah melalui pajak dan retribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, sedangkan retribusi daerah terdiri dari retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Pajak kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penelitian ini menggunakan beberapa pajak yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan sektor pariwisata. Pajak yang dimaksud meliputi:

a) Sektor Pertambangan yaitu:

1. Pajak mineral bukan logam dan batuan
2. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

b) Sektor Pariwisata yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

Retribusi daerah yang digunakan yaitu retribusi jasa usaha yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan sektor pariwisata, namun berdasarkan hasil data laporan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang peneliti dapat, hanya retribusi jasa usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Retribusi yang dimaksud meliputi; (1)Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah lain-lain; (3) Retribusi keplabuhan; (4) Retribusi tempat wisata; (5)Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Kontribusi Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Tahun	Sektor pertambangan (Rp)	Sektor Pariwisata (Rp)	Total PAD (Rp)	Sektor Pertambangan (%)	Sektor pariwisata (%)
2014	59.591.345.847	31.742.903.149	427.580.506.879	13,94	7,42
2015	35.230.805.563	35.576.078.187	599.620.953.180	5,93	5,92
2016	72.771.417.844	47.957.942.361	663.445.639.676	10,97	7,23
2017	96.237.290.589	49.857.480.706	879.784.561.698	10,94	5,67
2018	114.215.783.026	57.595.728.153	848.330.012.018	13,46	6,79

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung (2019)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diamati bahwa kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD berfluktuatif pada periode tahun 2014-2018. Kontribusi sektor pertambangan lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 11,03 persen dibandingkan dengan sektor pariwisata yang menyokong rata-rata PAD sebesar 7 persen. Kontribusi pada sektor pertambangan dan pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada sektor pertambangan pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 8,06 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sebagai indikator, salah satu indikator yang bisa melihat perkembangan perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan melalui PDRB. Berikut ini adalah PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga konstan selama periode tahun 2014-2018 terakhir yang ditunjukkan pada Tabel I.3 berikut:

Tabel 3. PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB					
ADHK (Juta Rupiah)	44.159.43	45.962.30	47.848.37	49.986.84	52.212.08
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9	3	1	6	8
	4,67	4,08	4,1	4,47	4,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kep. Bangka Belitung (2019)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa selama tahun 2014-2018, PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan setelah pada 2013-2015 selalu menunjukkan perlambatan. Perekonomian global yang semakin membaik pasca krisis yang sempat terjadi pada tahun 2013 mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas lokal seperti timah, karet, dan kelapa sawit (Rizka, 2018). Berdasarkan hasil penelitian Oktaviana dan Amalia tahun 2018 hasil perkiraan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kuartal pertama tahun 2018 hingga kuartal keempat tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat, dari hasil penelitian tersebut dapat diperkirakan bahwa PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan memiliki pertumbuhan yang baik.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor pertambangan yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Pariwisata berupa hotel/penginapan, restoran, usaha wisata seperti hiburan dan objek wisata maupun perjalanan wisata seperti agen *travel* bisa sebagai sumber-sumber pendapatan daerah bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak (Badrudin, 2001). Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dari sektor pariwisata: (1) Jumlah obyek wisata; (2) Jumlah wisatawan; (3) Jumlah Hotel; (4) Jumlah Restoran

Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu cerminan dalam menilai kinerja perekonomian secara riil suatu wilayah yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (bi.co.id, 2019). Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang didapat dari seluruh lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam kurung waktu satu tahun. Terjadinya kemajuan perekonomian menggambarkan pertumbuhan yang positif, sebaliknya apabila suatu wilayah mengalami penurunan perekonomian maka pertumbuhan wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif (bi.co.id, 2019).

B. Metode

Penelitian dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data target serta realisasi PAD, target dan realisasi pajak dan retribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata yang terdapat pada laporan PAD pada 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan data pertumbuhan ekonomi yaitu, data PDRB harga konstan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018.

C. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas yaitu mencari hubungan dari *output* dan *input* yang didapat apakah telah mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan efektif apabila telah mencapai atau melebihi target yang telah ditentukan (Mahmudi, 2010). Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak daerah yaitu: = $\frac{\text{realisasi penerimaan}}{\text{target penerimaan}} \times 100\%$

Mengukur tingkat efektivitas dapat dikategorikan berdasarkan Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Indikator Pengukur Efektivitas

Tingkat Pencapaian	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi 2010

Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan pajak daerah periode tertentu. Apabila hasilnya besar maka semakin besar juga peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:
$$= \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

Pengukuran kontribusi dilakukan dengan indikator pada Tabel 5:

Tabel 5. Indikator Pengukur Klarifikasi Kontribusi

Tingkat Pencapaian	Kategori
>50%	Sangat baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup baik
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Tingkat Efektivitas PAD Sektor Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan Kabupaten/ Kota tahun 2014-2018 berdasarkan rekapitulasi target dan realisasi PAD sektor pertambangan 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018, sebagaimana terdapat pada Tabel 6:

Tabel 6. Efektivitas PAD Sektor Pertambangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Tahun	Target PAD sektor pertambangan (Rp)	Realisasi PAD sektor pertambangan (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	51.454.677.075	59.591.345.847	115,81	Sangat efektif
2015	38.140.920.000	35.230.805.563	92,37	Efektif
2016	64.581.415.000	72.771.417.844	112,68	Sangat efektif
2017	73.759.278.664	96.237.290.589	127,00	Sangat efektif
2018	95.115.496.000	114.215.783.026	120,00	Sangat efektif

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 6, PAD sektor pertambangan tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata tercapai 113 persen tiap tahunnya dari target yang telah ditentukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurhayati, *et al* (2019), yang menunjukkan rata-rata penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2010-2017 termasuk dalam kategori sangat efektif. Persentase realisasi PAD sektor pertambangan terus mengalami kenaikan, namun sempat mengalami penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2015 sebanyak 23 persen dan tahun 2018 sebanyak 7 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi akibat berkurangnya target dan realisasi PAD sektor pertambangan dari Kabupaten Belitung Timur sebanyak Rp 18 Miliar dan realisasi Rp 25,5 Miliar. Diketahui Kabupaten Belitung merupakan Kabupaten dengan kontribusi target serta realisasi PAD sektor pertambangan terbesar pada tahun 2014.

Kabupaten Bangka dan Bangka Barat juga mengalami penurunan target dan realisasi PAD sektor pertambangan yang diperoleh dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak tersebut mengalami penurunan akibat adanya perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengolahan pertambangan mineral, tepatnya terdapat pada pasal 27-30 yaitu tentang penetapan WUP, WIUP, dan tata cara WIUP mineral/unsur bukan logam. Banyaknya perizinan yang belum terpenuhi terhadap pelaku usaha pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Belitung Timur sebagai penyokong pajak mineral bukan logam dan batuan terbesar membuat target dan realisasi PAD sektor pertambangan menurun.

Kabupaten Belitung Timur sendiri yang merupakan penyokong PAD sektor pertambangan terbesar dari 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memang telah menunjukkan data yang sangat efektif tiap tahun dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 131 persen. Kabupaten Belitung menjadi nomor dua tertinggi dengan rata-rata tingkat efektivitas 127 persen, dan tingkat efektivitas terendah pada Kabupaten Bangka Tengah dengan rata-rata tingkat efektivitas 90 persen. Tinggi dan rendahnya tingkat efektivitas setiap daerah dipengaruhi oleh pencapaian target yang telah ditetapkan, karena pajak tersebut termasuk pajak kabupaten serta peningkatan dan penurunan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan mempengaruhi tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan.

Tingkat Efektivitas PAD Sektor Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat efektivitas PAD sektor pariwisata Kabupaten/Kota tahun 2014-2018 berdasarkan target dan realisasi sebagaimana terdapat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Efektivitas PAD Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Tahun	Target PAD sektor pariwisata (Rp)	Realisasi PAD sektor pariwisata (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	27.111.021.767	31.742.903.149	117	Sangat efektif
2015	32.026.957.000	35.486.044.477	111	Sangat efektif
2016	34.714.975.000	47.957.942.361	128	Sangat efektif
2017	39.457.051.000	49.857.480.706	123	Sangat efektif
2018	42.161.864.097	57.595.728.153	128	Sangat efektif

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 7 bahwa PAD sektor pariwisata periode tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata tercapai 121 persen per tahun dari target yang telah ditentukan. Persentase realisasi PAD sektor pariwisata berflukatif tiap tahun namun target dan realisasi PAD sektor pariwisata terus meningkat dari tahun 2014-2018. Kabupaten Belitung sendiri yang merupakan penyokong PAD sektor pariwisata terbesar dari 6 Kabupaten dan 1 Kota lainnya setiap tahun dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 145%. Kota Pangkalpinang menjadi nomor dua tertinggi dengan rata-rata tingkat efektivitas 124%, dan tingkat efektivitas terendah adalah Kabupaten Bangka Tengah dengan rata-rata tingkat efektivitas 102%.

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat kontribusi PAD sektor pertambangan Kabupaten/Kota tahun 2014-2018 berdasarkan rekapitulasi perhitungan sebagaimana terdapat pada Tabel 8:

Tabel 8. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018

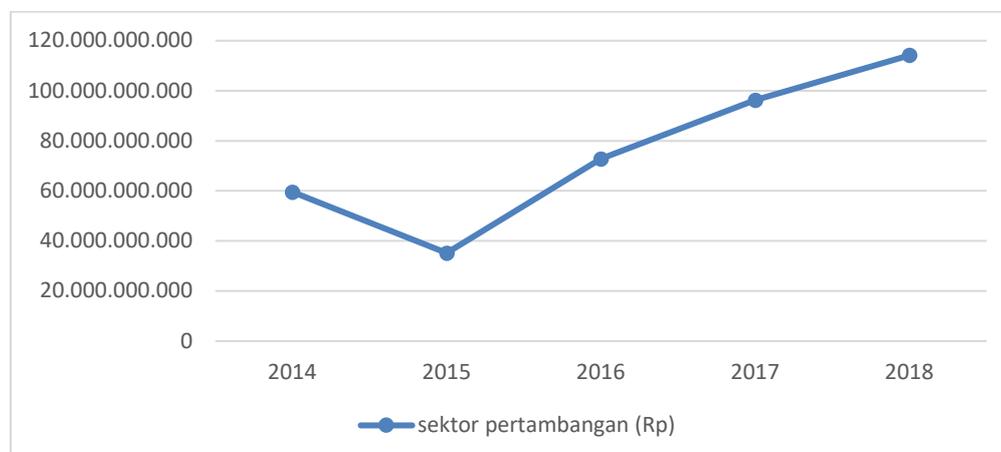
Tahun	sektor pertambangan (Rp)	Total PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	59.591.345.847	427.580.506.879	13,94	Kurang
2015	35.230.805.563	599.620.953.180	5,88	Sangat kurang
2016	72.771.417.844	663.445.639.676	10,97	Kurang
2017	96.237.290.589	879.784.561.698	10,94	Kurang
2018	114.215.783.026	848.330.012.018	13,46	Kurang

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 8 rata-rata kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD yaitu kurang, namun dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata selama tahun 2014-2018 sektor pertambangan berkontribusi sebesar Rp 75,6 Miliar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,03% (kurang) pertahun. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 40,87% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tabel yang telah disajikan, maka pergerakan kontribusi sektor pertambangan 2014-2018 dapat dilihat melalui Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Gambar 1, pergerakan kontribusi sektor pertambangan terus naik dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Diah, *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa ada penurunan kontribusi sektor pertambangan batu bara dari tahun ke tahun terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara, namun dalam hasil penelitian tersebut didapatkan juga hasil bahwa sektor pertambangan batu bara memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi sektor pertambangan periode tahun 2014-2018 terus meningkat, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan kontribusi sebanyak Rp 24,3 Miliar. Penurunan rata-rata kontribusi PAD sektor pertambangan pada tahun 2015 terjadi karena turunnya kontribusi dari Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp 18.8 Miliar yang diketahui pada tahun sebelumnya merupakan kabupaten dengan kontribusi sektor pertambangan terbesar dari ke 6 Kabupaten dan 1 Kota lainnya. Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat juga mengalami penurunan kontribusi PAD sektor pertambangan. Penurunan kontribusi PAD sektor pertambangan diduga mengalami penurunan akibat perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengolahan pertambangan mineral, tepatnya terdapat pada pasal 27-30 yaitu tentang penetapan WUP, WIUP, dan tata cara WIUP mineral/unsur bukan logam. Banyaknya perizinan yang belum terpenuhi terhadap pelaku usaha pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Belitung Timur sebagai penyokong pajak mineral bukan logam dan batuan terbesar membuat kontribusi PAD sektor pertambangan menurun.

Tahun 2016 kontribusi PAD sektor pertambangan menunjukkan peningkatan dan mulai bergerak naik hingga tahun 2018. Peningkatan rata-rata kontribusi PAD sektor pertambangan pada tahun 2016 terjadi karena naiknya kontribusi dari Kabupaten Belitung Timur sebanyak Rp 28,7 Miliar yang diketahui pada tahun sebelumnya telah mengalami penurunan kontribusi yang banyak dan pada tahun ini telah kembali membaik. Enam Kabupaten dan 1 Kota lainnya juga mengalami peningkatan kontribusi PAD pertambangan. Peningkatan tersebut karena pada tahun 2016 ini

kelengkapan izin pelaku usaha tambang telah tercapai setelah perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014, yang pada tahun 2015 masih dalam proses, sehingga kontribusi PAD sektor pertambangan mulai kembali membaik.

Rata-rata kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkontribusi sangat kurang kecuali pada Kabupaten Belitung Timur yang menunjukkan kontribusi baik dengan rata-rata Rp 26,7 Miliar atau sebesar 42% dari PAD pada periode tahun 2014-2018. Kabupaten Belitung Timur yang merupakan penyokong PAD sektor pertambangan terbesar dari 6 Kabupaten dan 1 Kota lainnya memang telah berkontribusi baik hingga sangat baik tiap tahun kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebanyak 76 persen dari tahun sebelumnya, sehingga sangat kurang berkontribusi pada tahun tersebut. Banyaknya potensi pertambangan dan tingginya permintaan pasar, maka tak heran apabila Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten penyokong PAD sektor pertambangan terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan hasil penelitian dari Mikad, Ukar, dan Sri (2015) yang menunjukkan pengelolaan sektor pertambangan BGI belum optimal di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Belitung menjadi nomor 2 tertinggi tingkat kontribusi PAD sektor pertambangan dengan rata-rata Rp 21,5 Miliar atau berkontribusi sebanyak 19,88% dari PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota, dan tingkat efektivitas terendah pada Kabupaten Bangka Barat rata-rata Rp 564 Juta dengan kontribusi 0,6%. Kurangnya permintaan pasar dan sedikitnya pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam yang ada di Kabupaten Bangka Barat adalah penyebab kabupaten tersebut menjadi kabupaten dengan jumlah penyokong PAD sektor pertambangan paling sedikit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil tingkat kontribusi PAD sektor pariwisata 6 Kabupaten dan 1 Kota periode tahun 2014-2018 yang telah disajikan, maka dapat diperoleh hasil rekapitulasi perhitungan kontribusi PAD sektor pariwisata 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2014-2018, pada Tabel 9 berikut:

**Tabel 9. Kontribusi Sektor Pariwisata PAD Kabupaten/Kota di Provinsi
Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018**

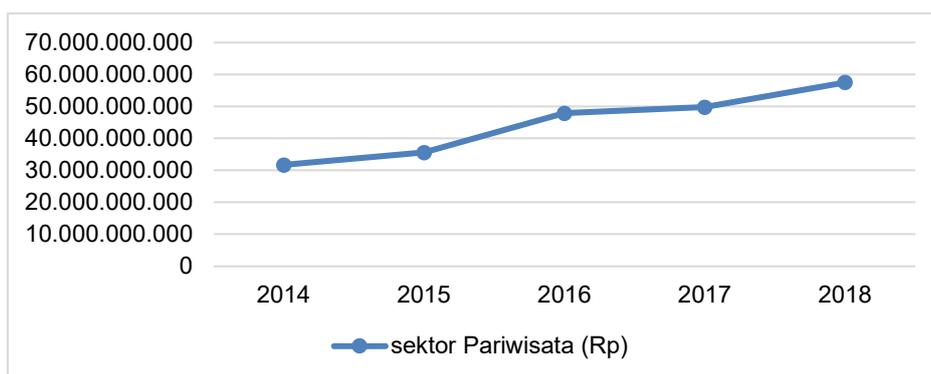
Tahun	sektor Pariwisata (Rp)	Total PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	31.742.903.149	427.580.506.879	7,42	Sangat kurang
2015	35.576.078.187	599.620.953.180	5,93	Sangat kurang
2016	47.957.942.361	663.445.639.676	7,23	Sangat kurang
2017	49.857.480.706	879.784.561.698	5,67	Sangat kurang
2018	57.595.728.153	848.330.012.018	6,79	Sangat kurang

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 9, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata selama periode 2014-2018 berkontribusi sejumlah Rp 44,5 Miliar, dengan rata-rata kontribusi sebesar 7 persen pertahun (sangat kurang), namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 9, maka pergerakan kontribusi sektor pariwisata 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

**Gambar 2. Kontribusi Sektor Pariwisata PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota di
Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Gambar 2, kontribusi sektor pariwisata menunjukkan pergerakan yang naik. Peningkatan kontribusi yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2018

mencerminkan potensi wisata semakin baik. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata paling banyak terjadi pada tahun 2016. Peningkatan rata-rata kontribusi PAD sektor pariwisata pada tahun 2016 terjadi karena naiknya kontribusi dari Kabupaten Belitung sebanyak Rp 7,6 Miliar yang disebabkan meningkatnya pajak dan retribusi sektor pariwisata. 6 Kabupaten dan 1 Kota lainnya juga mengalami peningkatan kontribusi kecuali Kabupaten Bangka Selatan. Penurunan kontribusi Kabupaten Bangka Selatan diakibatkan berkurangnya jumlah pajak sektor pariwisata. Kabupaten Belitung merupakan penyokong PAD sektor pariwisata terbesar dari 6 Kabupaten dan 1 Kota lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar Rp 15 Miliar atau sebesar 10,9% dari PAD 6 Kabupaten dan 1 kota pada periode 2014-2018, hal tersebut terjadi karena kabupaten belitung memiliki jumlah wisatawan terbanyak dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Shakibul, *et al* (2015) bahwa jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan dalam negeri, dan jumlah lokasi wisata berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sabang.

Kota Pangkalpinang menjadi nomor 2 tertinggi tingkat kontribusi PAD sektor pariwisata dengan rata-rata Rp 10,7 Miliar atau berkontribusi sebanyak 7,7 persen dari PAD 6 Kabupaten lainnya, kemudian Kabupaten Tengah rata-rata Rp 9,4 Miliar dengan tingkat kontribusi 12%, dan tingkat kontribusi terendah adalah Kabupaten Belitung Timur rata-rata Rp 1,41 Miliar dengan kontribusi 2%.

Perbandingan Realisasi PAD Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berikut adalah perbandingan realisasi PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata yang peneliti bandingkan melalui uji rasio efektivitas dan rasio kontribusi, yaitu:

a. Hasil perbandingan tingkat efektivitas

Berdasarkan hasil tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata yang telah diperoleh dari kedua sektor tersebut tidak memiliki perbandingan yang banyak karena dari hasil uji rasio efektivitas didapatkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama, yaitu sangat efektif. Perolehan hasil di periode tahun 2014-2018 rata-rata sektor pertambangan telah mencapai target sebesar 113% (sangat efektif) per tahun dan sektor pariwisata setelah mencapai target sebesar 121% (sangat efektif). Apabila dilihat per

kabupaten/kota maka tingkat efektivitas PAD sektor pariwisata lebih stabil dan memiliki pemerataan tingkat efektif yang rata-rata sangat efektif.

b. Hasil perbandingan tingkat kontribusi

Dilihat Berdasarkan hasil kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu sektor pertambangan memiliki kontribusi yang kurang terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan untuk sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perolehan hasil kontribusi di periode tahun 2014-2018 rata-rata sektor pertambangan telah berkontribusi Rp 75,6 Miliar yaitu sebesar 11% (kurang) terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tahun, sedangkan sektor pariwisata berkontribusi Rp 44,5 Miliar yaitu sebesar 7% (sangat kurang). Apabila dilihat dari jumlah nominal kontribusi maka sektor pertambangan memiliki kontribusi lebih besar dari sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perbedaan sejumlah Rp 31 Miliar.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif, namun apabila dilihat per kabupaten dan kota maka tingkat efektifita PAD sektor pariwisata lebih stabil dan memiliki pemerataan tingkat efektif yang rata-rata sangat efektif.
2. Berdasarkan hasil kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diperoleh hasil kontribusi pada periode 2014-2018 rata-rata sektor pertambangan telah berkontribusi sebesar 11 persen (kurang), sedangkan sektor pariwisata berkontribusi sebesar 7 persen (sangat kurang).
3. Berdasarkan tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata yang telah diperoleh dari kedua sektor tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama, yaitu sangat efektif. Berdasarkan hasil kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perbedaan, yaitu sektor pertambangan memiliki kontribusi yang kurang,

sedangkan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD Provinsi di Kepulauan Bangka Belitung.

Saran

1. Untuk meningkatkan PAD sektor pertambangan terhadap seluruh 6 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga untuk menambah tingkat realisasi agar tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata menjadi sangat efektif.
2. Untuk meningkatkan kontribusi dari kedua sektor terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tingkat kontribusinya baik, terutama terhadap sektor pariwisata yang diketahui tingkat kontribusinya masih sangat kurang.

E. Daftar Pustaka

- Amnar, S., Muhammad, S. & Nur, M. (2015). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol 4 No.1.
- Badrudin. (2001). *Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Istimewa Yogyakarta melalui Pembangunan Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Kompak.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mikad, Wijaya, U. & Widayati, S. (2015). Analisis Peran Sektor Pertambangan BGI dalam Upaya mendukung Perekonomian Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Porsiding Teknik Pertambangan*, ISSN 2460-6499.
- Nurhayati., Zuhri,N., & Valeriani,D (2019). Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB: Indonesian Journal Of Accounting and Business*. Vol 1 Ed 1. 15-28
- Oktaviana & Amalia. (2018). Gross Regional Domestic Product Forecasts Using Trend Analysis: Case Study Of Bangka Belitung Prvince. *Jurnal Ekonmi & Studi Pembangunan*, Vol 19 No.2.
- Rizka, P. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Lapangan Usaha tahun 2013-2017*. Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Zuhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Bangka Belitung dalam Angka 2018*
- Badan Keuangan Daerah (2019). *Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Bank Indonesia (2019), PDRBSEKDA
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

- Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta